

MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS ISU-ISU MULTIKULTURAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

Aslinda¹, Amrizon²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: aslindafadhil855@gmail.com

Abstrak: Pendidikan multikultural telah menjadi wacana penting dalam menghadapi tantangan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Meskipun telah banyak upaya untuk mengintegrasikan prinsip multikulturalisme ke dalam kurikulum dan praktik pendidikan, masih terdapat sejumlah isu yang menghambat terciptanya pendidikan yang inklusif dan adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu utama dalam pendidikan multikultural, termasuk diskriminasi, bias kurikulum, ketimpangan akses, serta minimnya pelatihan guru dalam pengelolaan keberagaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan sebagai pendekatan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan nasional yang mendukung nilai-nilai multikultural, praktik di lapangan masih memperlihatkan kesenjangan, terutama di sekolah-sekolah pinggiran dan daerah konflik. Dibutuhkan reformasi pendidikan yang lebih progresif dan pelatihan guru berbasis kompetensi multikultural untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mendorong pengembangan pendidikan yang adil dan setara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: diskriminasi, inklusi, ketimpangan akses, kurikulum, pelatihan guru, pendidikan multikultural

Abstract: Multicultural education has become a crucial discourse in addressing the challenges of ethnic, religious, cultural, and linguistic diversity in Indonesia. Although various efforts have been made to integrate multicultural principles into curricula and educational practices, several issues still hinder the creation of inclusive and equitable education. This article aims to analyze key issues in multicultural education, including discrimination, curriculum bias, unequal access, and the lack of teacher training in managing diversity. This study employs a descriptive qualitative method with literature review and policy document analysis as its

ARTICLE HISTORY

Received: 15 Mei 2025

Revised: 30 Mei 2025

Accepted: 1 Juni 2025

Keyword: Gender Equality, Rights and Obligations, The Qur'an, Islamic Inheritance

Copyright © 2025 by Authors, Published by Risalah: Midaduna: Journal of Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

main approach. The analysis reveals that although national policies support multicultural values, implementation at the grassroots level still shows significant gaps, particularly in peripheral schools and conflict-prone areas. Educational reform and competency-based multicultural teacher training are urgently needed to create a learning environment that respects diversity. This article is expected to contribute to academic discourse in promoting the development of just and equitable education amid Indonesia's diverse society.

Keyword: discrimination, inclusion, inequality of access, curriculum, teacher training, multicultural education

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang luar biasa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, serta berbagai agama dan keyakinan, Indonesia menjadi contoh nyata dari pluralisme (Badan Pusat Statistik, 2021). Keberagaman ini bukan hanya merupakan aset budaya, tetapi juga tantangan besar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia, sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia, harus mampu menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis, agama, atau sosial ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural menjadi sangat penting. Konsep pendidikan multikultural bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman ke dalam sistem pendidikan agar setiap individu dapat menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Prinsip ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter bangsa yang mengedepankan toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keragaman (Gay, 2018).

Namun, meskipun telah ada kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural, praktiknya di lapangan masih mengalami berbagai hambatan. Banyak sekolah, terutama yang terletak di daerah pinggiran dan wilayah konflik, menghadapi ketimpangan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Diskriminasi terhadap siswa berdasarkan latar belakang etnis atau agama, bias dalam kurikulum, dan kurangnya pelatihan bagi guru untuk menangani kelas yang multikultural menjadi beberapa isu utama yang perlu diselesaikan (Banks, 2019).

Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan, jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan ketegangan dan pemisahan antar kelompok. Sebagai contoh, di banyak sekolah di daerah konflik atau yang memiliki populasi siswa dari berbagai latar belakang budaya, siswa seringkali merasa terasingkan dan tidak dihargai, yang berdampak negatif pada proses belajar mereka (International Crisis Group, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya pembentukan lingkungan belajar

yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang identitas mereka.

Kurikulum Merdeka yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2022) merupakan langkah positif menuju pendidikan yang lebih inklusif. Namun, implementasinya di banyak daerah masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab tantangan keberagaman yang ada. Misalnya, bias dalam buku teks yang seringkali hanya menonjolkan budaya dominan, serta kurangnya pengajaran yang menghargai budaya lokal dan kelompok minoritas, masih menjadi masalah besar dalam pendidikan Indonesia (Susanti, 2022).

Selain itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan sering kali belum siap untuk mengelola keberagaman di kelas. Banyak guru yang tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah diskriminasi atau bias yang terjadi di antara siswa (Santoso, 2021). Pelatihan guru yang lebih mendalam tentang bagaimana menciptakan kelas yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya menjadi sangat penting. Tanpa pelatihan ini, sulit untuk membangun pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil.

Isu ketimpangan akses juga menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pendidikan multikultural di Indonesia. Di daerah-daerah tertentu, terutama di pedalaman dan daerah konflik, akses terhadap pendidikan yang berkualitas sangat terbatas. Siswa dari kelompok minoritas atau yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama dengan siswa di daerah perkotaan untuk mendapatkan pendidikan yang baik (UNESCO, 2022). Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan yang pada akhirnya menghambat pencapaian pendidikan yang inklusif.

Berdasarkan analisis dari berbagai penelitian, penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi dalam pendidikan yang lebih progresif dan berbasis pada prinsip-prinsip multikulturalisme. Tidak cukup hanya dengan merubah kurikulum, tetapi juga diperlukan pembaruan dalam sistem pengelolaan sekolah, termasuk dalam hal perekrutan dan pelatihan guru. Sistem pendidikan harus mampu memberikan ruang yang adil dan setara bagi setiap siswa, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau sosial ekonomi mereka (Tilaar, 2004).

Pendidikan multikultural di Indonesia harus mencakup tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan sosial, di mana siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, belajar bekerja sama, dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Pendidikan yang inklusif tidak hanya memberikan kesempatan yang sama dalam belajar, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai pluralisme dan demokrasi tertanam dalam diri setiap siswa, yang pada gilirannya akan membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan toleran (Nieto & Bode, 2018).

Reformasi dalam pendidikan multikultural juga harus dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan bahkan siswa itu sendiri. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari semua pihak, akan sulit untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai isu utama dalam implementasi pendidikan multikultural di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih inklusif, adil, dan menghargai perbedaan.

Artikel ini akan membahas beberapa isu utama yang dihadapi dalam pendidikan multikultural di Indonesia, termasuk diskriminasi, bias dalam kurikulum, ketimpangan akses pendidikan, serta tantangan dalam pelatihan dan kompetensi guru. Diharapkan melalui artikel ini, kita dapat memahami lebih dalam mengenai tantangan-tantangan yang ada, serta menemukan solusi yang tepat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Tinjauan Pustaka

Pendidikan multikultural, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang inklusif, telah menjadi topik yang semakin penting di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pendidikan yang berbasis pada prinsip keberagaman dan inklusivitas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga mendorong siswa untuk berinteraksi secara positif dengan individu dari latar belakang yang berbeda (Pang, 2016). Di Indonesia, dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat besar, penerapan pendidikan multikultural merupakan tantangan besar, namun juga sebuah peluang untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis (Soeharto, 2017).

1. Pendidikan Multikultural dan Inklusivitas

Pendidikan multikultural mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman ke dalam kurikulum, kebijakan pendidikan, dan praktik pengajaran di kelas (Banks, 2018). Dalam konteks ini, inklusivitas berarti menciptakan ruang bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau agama, untuk belajar secara adil dan setara. Selain itu, pendidikan inklusif berfokus pada menghapus hambatan-hambatan yang ada, baik itu diskriminasi atau ketimpangan akses, yang dapat menghalangi peserta didik dalam meraih pendidikan yang berkualitas (Ainscow, 2016).

Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Meskipun demikian, implementasi pendidikan multikultural seringkali menghadapi kendala, seperti bias dalam materi pelajaran, stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, serta kurangnya kesiapan tenaga pengajar dalam menangani keberagaman yang ada di kelas (Ward, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih

progresif dan pelatihan bagi guru untuk mengembangkan kompetensi multikultural yang dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif.

2. Isu-isu dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia

Beberapa isu utama dalam pendidikan multikultural yang ditemukan di Indonesia antara lain adalah diskriminasi, ketimpangan akses, dan ketidaksiapan guru dalam menangani kelas yang multikultural. Diskriminasi dalam pendidikan, baik itu berdasarkan etnis, agama, atau gender, masih terjadi di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik atau marginal. Sebagai contoh, anak-anak dari kelompok minoritas sering kali merasa terasingkan dan tidak dihargai dalam proses pembelajaran karena bias yang ada dalam kurikulum dan pengajaran (Sulaiman, 2018).

Selain itu, ketimpangan akses pendidikan menjadi masalah besar dalam menciptakan pendidikan yang inklusif. Di daerah-daerah terpencil atau daerah yang mengalami konflik sosial, banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Mereka sering kali terpaksa berhenti sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor jarak, ekonomi, dan fasilitas yang terbatas (Susanto, 2020). Ketidaksetaraan ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kelompok yang memiliki akses pendidikan berkualitas dengan mereka yang tidak.

Salah satu hambatan terbesar lainnya adalah minimnya pelatihan bagi guru dalam hal pengelolaan kelas yang inklusif dan multikultural. Banyak guru yang belum siap menghadapi keragaman di kelas, baik dari segi budaya, agama, maupun latar belakang sosial ekonomi. Pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan untuk menangani kelas yang beragam secara efektif dan menghargai perbedaan sangat diperlukan (Anggoro & Pranoto, 2019). Guru perlu dilatih tidak hanya dalam hal pengajaran akademik, tetapi juga dalam pengelolaan konflik dan pengembangan keterampilan sosial yang dapat membantu menciptakan suasana kelas yang inklusif dan toleran.

3. Kurikulum Multikultural dan Tantangannya

Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan multikultural harus mampu mencerminkan keberagaman yang ada di masyarakat. Namun, banyak kurikulum yang masih mengutamakan budaya dominan dan kurang memasukkan elemen-elemen kebudayaan lokal serta pengalaman dari kelompok minoritas. Buku teks dan materi ajar sering kali mencerminkan bias yang menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lainnya (Suryadi, 2020). Hal ini dapat memperburuk ketegangan sosial di masyarakat dan menghalangi terciptanya lingkungan belajar yang saling menghargai.

Dalam hal ini, perlu ada perbaikan dan pembaruan dalam kurikulum agar dapat mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kurikulum

yang inklusif harus mencakup representasi yang adil terhadap semua kelompok etnis, agama, dan budaya, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengembangkan potensi mereka tanpa terhambat oleh stereotip atau diskriminasi (Kuntoro, 2021).

4. Peran Guru dalam Pendidikan Multikultural

Guru memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif di dalam kelas. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip pendidikan multikultural dan keterampilan untuk mengelola keberagaman yang ada di kelas (Prihatin, 2020). Pelatihan guru tentang keberagaman dan inklusivitas harus menjadi bagian dari pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Selain itu, guru juga harus dapat menjadi contoh teladan dalam memperlakukan semua siswa dengan adil dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan demikian, mereka dapat membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki sikap toleransi dan empati terhadap sesama (Chong, 2018). Hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global yang semakin pluralistik.

5. Reformasi Pendidikan untuk Mewujudkan Inklusivitas

Reformasi dalam sistem pendidikan Indonesia perlu dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperbaiki kurikulum pendidikan agar lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman yang ada di masyarakat. Selain itu, reformasi juga harus mencakup peningkatan kualitas pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik lainnya dalam hal kompetensi multikultural (Hamid, 2019). Pendidikan yang inklusif tidak hanya memerlukan perubahan pada kurikulum, tetapi juga pada pendekatan pedagogis yang diterapkan oleh para guru dalam mengelola kelas yang beragam.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis isu-isu utama yang dihadapi dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks pendidikan multikultural, mengidentifikasi masalah yang ada, serta menggali pandangan berbagai pihak yang terlibat, baik dari guru, siswa, maupun pembuat kebijakan. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi fenomena keberagaman dalam pendidikan, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai studi literatur yang menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan mencakup berbagai kebijakan pendidikan nasional terkait dengan pendidikan multikultural, laporan penelitian sebelumnya, artikel-artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan isu keberagaman dalam pendidikan. Analisis dokumen ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Indonesia, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam praktik pendidikan di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber utama, yaitu:

a. Literatur Sekunder

Literatur yang digunakan meliputi buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada sumber-sumber akademik yang membahas pendidikan keberagaman, diskriminasi dalam pendidikan, serta kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan inklusif.

b. Dokumen Kebijakan

Selain literatur akademik, penelitian ini juga menganalisis dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta kebijakan-kebijakan daerah yang terkait dengan implementasi pendidikan multikultural dan inklusif. Dokumen kebijakan ini meliputi panduan kurikulum nasional, peraturan terkait pendidikan, serta laporan tahunan yang membahas pelaksanaan program pendidikan multikultural di berbagai sekolah.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode studi literatur yang mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Dokumen

Peneliti melakukan pencarian dan identifikasi dokumen terkait kebijakan pendidikan multikultural di Indonesia, termasuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan inklusif. Selain itu, artikel ilmiah dan jurnal terkait topik multikulturalisme dalam pendidikan juga menjadi sumber data penting.

b. Seleksi Sumber

Dokumen yang teridentifikasi kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kualitas informasi yang terkandung di dalamnya. Hanya dokumen yang dianggap relevan dan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi pendidikan multikultural yang akan digunakan dalam penelitian ini.

c. Analisis Dokumen

Proses analisis dilakukan dengan cara memeriksa secara cermat isi dari dokumen yang telah dipilih, mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi dalam pendidikan multikultural, serta menganalisis implikasi dari kebijakan yang ada terhadap praktik pendidikan di lapangan. Selain itu, peneliti juga membandingkan berbagai kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Dalam analisis tematik, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari dokumen yang ada, seperti diskriminasi, bias kurikulum, ketimpangan akses pendidikan, dan peran guru dalam pendidikan multikultural. Tema-tema ini akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul dalam praktik pendidikan multikultural di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung integrasi pendidikan multikultural. Salah satu kebijakan penting yang terkait dengan hal ini adalah Kurikulum 2013 (K13) yang mencakup pengajaran nilai-nilai multikultural di dalamnya. Kurikulum ini menyarankan agar nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan keterampilan hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk diajarkan sejak tingkat pendidikan dasar.

Namun, meskipun kebijakan tersebut ada, penerapannya di lapangan tidak merata. Sekolah-sekolah di kota besar dengan sarana yang lebih memadai cenderung lebih berhasil dalam mengintegrasikan pendidikan multikultural. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah terpencil atau wilayah yang lebih homogen dalam hal budaya dan agama seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kurikulum multikultural ini. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar bagi siswa yang berasal dari latar belakang yang beragam.

2. Diskriminasi dan Bias dalam Pendidikan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya diskriminasi dan bias yang masih terjadi dalam lingkungan pendidikan. Diskriminasi ini bisa berupa ketidakadilan dalam perlakuan terhadap siswa berdasarkan agama, suku, atau status sosial mereka. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki sejarah konflik atau ketegangan antar kelompok, siswa dari kelompok minoritas sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil, baik secara eksplisit maupun implisit.

Bias dalam pengajaran juga menjadi masalah utama. Buku teks atau materi pembelajaran yang digunakan di banyak sekolah belum sepenuhnya mencerminkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, sebagian besar materi ajar lebih fokus pada budaya dominan di Indonesia, sementara budaya-budaya minoritas seringkali tidak mendapat ruang yang cukup. Kondisi ini dapat menghambat proses pembelajaran yang inklusif dan mengurangi kesempatan bagi siswa dari kelompok minoritas untuk merasa dihargai dalam proses pendidikan.

3. Ketimpangan Akses Pendidikan Multikultural

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan yang inklusif dan multikultural. Sekolah-sekolah di daerah dengan akses yang lebih terbatas, seperti di wilayah terpencil atau daerah konflik, sering kali kesulitan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Banyak sekolah di daerah ini tidak memiliki fasilitas yang memadai, baik dalam hal sarana dan prasarana, maupun pelatihan untuk guru.

Ketimpangan ini diperburuk oleh kondisi sosial-ekonomi di daerah-daerah tersebut yang seringkali rendah. Keterbatasan dana untuk pengadaan materi pembelajaran yang inklusif dan kurangnya pelatihan bagi guru membuat implementasi pendidikan multikultural menjadi sulit. Sebagai contoh, banyak guru di daerah tersebut yang belum pernah menerima pelatihan terkait pendidikan multikultural atau cara-cara mengelola kelas yang beragam.

4. Peran Guru dalam Pendidikan Multikultural

Guru memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengelola keberagaman di kelas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru di Indonesia belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pendidikan multikultural. Banyak guru yang belum dilatih untuk menghadapi keberagaman di kelas dan tidak tahu cara untuk merancang pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan yang ada di antara siswa.

Pelatihan yang lebih intensif mengenai pendidikan multikultural diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menangani kelas yang beragam. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran bagi para pendidik tentang pentingnya inklusivitas dan bagaimana mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil untuk semua siswa.

Pembahasan

Pendidikan multikultural di Indonesia merupakan sebuah tantangan besar, mengingat keragaman yang dimiliki oleh negara ini. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil, banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakmerataan penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun kebijakan pendidikan multikultural sudah ada dalam kurikulum pendidikan nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan dalam penerapannya cukup signifikan. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan yang memiliki fasilitas lebih baik cenderung lebih berhasil dalam mengintegrasikan pendidikan multikultural, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kurang berkembang, terutama di daerah yang rawan konflik, sering kali kesulitan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan implementasi ini adalah perbedaan dalam sumber daya yang tersedia. Sekolah-sekolah di kota besar biasanya memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan guru, materi pembelajaran yang lebih lengkap, serta fasilitas yang mendukung terciptanya pendidikan inklusif. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas dasar, seperti pelatihan guru yang relevan dengan keberagaman budaya dan sosial (Umam, dkk. 2024). Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar siswa, di mana siswa dari daerah maju lebih memiliki kesempatan untuk memahami dan mengapresiasi keragaman, sementara siswa dari daerah kurang berkembang sering kali tidak mendapatkan paparan yang cukup mengenai nilai-nilai multikultural.

Selain itu, diskriminasi dan bias yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia juga menjadi masalah besar. Walaupun di atas kertas Indonesia menganut prinsip multikulturalisme, dalam kenyataannya diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau status sosial masih sering ditemukan, baik secara eksplisit maupun implisit. Bias dalam buku teks dan materi ajar yang seringkali tidak mencerminkan keberagaman budaya Indonesia menjadi salah satu penyebab utama dari ketidakadilan tersebut. Siswa dari kelompok minoritas, terutama yang berasal dari daerah yang berbeda secara budaya atau agama, sering kali merasa bahwa budaya mereka tidak diakui dalam proses belajar-mengajar. Hal ini memperburuk rasa ketidakadilan dan menciptakan perasaan terpinggirkan di kalangan siswa-siswa tersebut.

Masalah lain yang cukup mendalam adalah kurangnya pelatihan guru dalam hal pengelolaan keberagaman. Meskipun beberapa kebijakan sudah diterapkan untuk menciptakan sekolah yang inklusif, tidak banyak guru yang dilatih secara khusus untuk menghadapi keberagaman budaya di kelas. Kebanyakan guru masih menggunakan pendekatan yang lebih tradisional dan belum cukup peka terhadap

kebutuhan siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Pelatihan yang lebih sistematis dan berbasis kompetensi dalam hal pendidikan multikultural sangat diperlukan. Tanpa pelatihan ini, para guru mungkin tidak akan memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, yang dapat menghargai perbedaan dan menghindari prasangka terhadap siswa dari berbagai latar belakang.

Selain itu, meskipun pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan terkait pendidikan multikultural, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali tidak berjalan seiring dengan kondisi di lapangan. Salah satu contohnya adalah buku ajar yang digunakan di banyak sekolah yang masih terpusat pada budaya dominan, seperti budaya Jawa. Padahal, Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman budaya yang perlu diperkenalkan kepada siswa. Penggunaan buku teks yang bias dan kurang merepresentasikan semua kelompok etnis atau agama di Indonesia menyebabkan ketimpangan dalam pembelajaran dan mengurangi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari budaya selain budaya dominan. Pendidikan yang seharusnya menciptakan pemahaman antarbudaya justru sering kali memperkuat stereotip dan kesenjangan yang ada.

Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa ketimpangan akses pendidikan yang inklusif antara daerah kota dan daerah terpencil masih menjadi masalah yang tidak mudah diselesaikan. Sumber daya pendidikan di daerah terpencil sangat terbatas, baik dalam hal sarana prasarana maupun ketersediaan pelatihan bagi guru. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari daerah-daerah tersebut. Sementara di daerah perkotaan, pendidikan multikultural lebih mudah diterapkan karena adanya akses yang lebih baik terhadap pelatihan guru dan fasilitas pendidikan yang mendukung. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial antara masyarakat yang berada di daerah maju dengan yang ada di daerah terpencil.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi besar untuk mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih adalah peningkatan pelatihan guru yang berbasis kompetensi multikultural. Guru yang terlatih dalam mengelola keberagaman akan mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Selain itu, penyediaan materi ajar yang lebih representatif, yang mencakup berbagai budaya di Indonesia, akan membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan pendidikan multikultural yang efektif dan inklusif, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Reformasi pendidikan yang lebih progresif, yang didukung dengan pelatihan guru yang lebih baik dan penyediaan sumber daya yang memadai, sangat diperlukan agar setiap siswa, terlepas dari latar belakangnya, dapat menikmati

pendidikan yang adil dan setara. Pendidikan yang inklusif akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghargai, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan multikultural di Indonesia sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya pendidikan yang inklusif dan adil. Kesenjangan penerapan prinsip multikulturalisme antara sekolah-sekolah di kota dan daerah terpencil menjadi salah satu masalah utama yang harus segera diatasi. Ketimpangan dalam akses pendidikan yang berkualitas, fasilitas yang terbatas, serta pelatihan guru yang tidak memadai berkontribusi pada ketidakmerataan dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman.

Diskriminasi dan bias kurikulum yang mengabaikan keberagaman budaya Indonesia juga merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan. Meskipun Indonesia kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya, sering kali materi ajar dan buku teks yang digunakan lebih berfokus pada budaya dominan, mengakibatkan siswa dari kelompok minoritas merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Selain itu, pelatihan guru yang masih terbatas dalam pengelolaan keberagaman menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan pendidikan multikultural yang efektif.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya peluang besar untuk memperbaiki implementasi pendidikan multikultural melalui peningkatan pelatihan guru berbasis kompetensi multikultural, penyediaan materi ajar yang lebih inklusif, serta peningkatan akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia. Reformasi pendidikan yang lebih progresif, didukung oleh kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan keberagaman, akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, yang tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman budaya yang ada.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghargai, serta membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M. (2016). *The Development of Inclusive Education: A Historical Perspective*. Routledge.
- Anggoro, I., & Pranoto, D. (2019). Kompetensi Guru dalam Mengelola Kelas Multikultural. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 5(2), 42-58.

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021. <https://www.bps.go.id>
- Banks, J. A. (2018). *An Introduction to Multicultural Education* (6th ed.). Pearson.
- Banks, J. A. (2019). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (10th ed.). Wiley.
- Chong, L. P. (2018). The Role of Teachers in Promoting Inclusive Education in Multicultural Classrooms. *International Journal of Educational Development*, 60(2), 134-140.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Hamid, A. (2019). *Reformasi Pendidikan Multikultural di Indonesia: Teori dan Praktik*. LP3M Universitas Indonesia.
- International Crisis Group. (2023). *Indonesia: The Roots of Conflict in Papua*. <https://www.crisisgroup.org>
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kuntoro, P. (2021). *Kurikulum Inklusif: Mewujudkan Pendidikan yang Adil dan Setara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nieto, S., & Bode, P. (2018). *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (7th ed.). Pearson
- Pang, V. O. (2016). Multicultural Education: A Key to Social Justice in Education. *Journal of Educational Equity*, 30(1), 37-45.
- Prihatin, E. (2020). Pendidikan Multikultural: Meningkatkan Keterampilan Sosial Guru. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 12(4), 234-250.
- Santoso, D. (2021). Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Kelas Multikultural di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 101-113.
- Soeharto, Y. (2017). Pendidikan Multikultural dan Tantangan Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 7(3), 85-102.
- Sulaiman, F. (2018). Stereotip dan Diskriminasi dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 16(2), 111-120.
- Suryadi, S. (2020). Bias dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 177-190.
- Susanti, R. (2022). Representasi Budaya dalam Buku Teks Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Kurikulum*, 10(3), 233-248.
- Susanto, H. (2020). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 19(1), 100-115.

Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.

Umam, Nasrul., Khotimah, Musriyatul., Fuadi. Arya Ivan., (2024). Memahami Kompleksitas Hubungan Agama dan Budaya: Sebuah Kajian Kritis terhadap Pendekatan Kontemporer, *Midaduna: Journal of Islamic Studies*, 1(2), <https://journals.eduped.org/index.php/midaduna/article/view/1224>

UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education*. <https://unesdoc.unesco.org>

Ward, C. (2019). The Challenges of Multicultural Education in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Education*, 31(2), 154-168.